

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan internasional antar negara dengan individu atau antar negara dengan organisasi internasional tidak selalu terjalin dengan baik. Seringkali hubungan ini menimbulkan konflik di antara mereka. Sengketa dapat muncul dari berbagai sumber sengketa potensial. Kemungkinan penyebab perselisihan antar negara dapat berupa strategi politik, militer, ekonomi atau ideologis atau kombinasi dari kepentingan-kepentingan tersebut.

Secara umum, hukum internasional membedakan sengketa internasional antara sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik adalah sengketa di mana suatu negara mendasarkan klaimnya atas dasar non-hukum, seperti politik atau kepentingan nasional lainnya, sedangkan klaim adalah perselisihan di mana suatu negara mendasarkan perselisihan atau klaimnya atas dasar ketentuan perjanjian atau berdasarkan undang-undang.

Konflik tidak dapat dihindari dalam hubungan internasional. Seperti halnya masyarakat, negara seringkali menginginkan sesuatu, tetapi kondisi tidak memungkinkan atau persyaratan tidak terpenuhi. Akibatnya, negara-negara ini mencapai kesepakatan, bertukar posisi, dan memobilisasi sumber daya sampai ada situasi yang memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, perselisihan harus diterima sebagai konsep yang dapat diterima dalam hubungan internasional. Perselisihan antara Yunani dan Makedonia atas sengketa nama Makedonia sejak tahun 1991 merupakan contoh sengketa internasional.

Makedonia terletak di Semenanjung Balkan di Eropa selatan. Makedonia berbatasan langsung dengan Yunani, Albania, Kosovo dan Bulgaria dan baru didirikan pada 8 September 1991 setelah runtuhnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia (SFRY). Makedonia sebelumnya dikenal sebagai Republik Sosialis Makedonia di bawah Yugoslavia. Namun sejak Makedonia mendeklarasikan kemerdekaannya, negara yang terkurung daratan ini harus berperang dengan Yunani. Karena Yunani memiliki wilayah di selatan yang disebut Makedonia. Masalahnya semakin besar dan kompleks. Yunani dan Makedonia tidak puas dengan memperebutkan nama negara, mereka menuntut budaya dan identitas masa lalu. Dibandingkan dengan Makedonia yang relatif muda, negara Yunani mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada 25 Maret 1821.

Makedonia bagi orang Yunani tidak seperti yang diwakili oleh Slavia. Makedonia memiliki akar sejarah yang kuat, terkait dengan keberadaan Kerajaan Makedonia kuno, yang mewakili peradaban Yunani kuno. Dikatakan bahwa beberapa tokoh penting dan raja-raja Yunani kuno lahir selama Kekaisaran Makedonia. Misalnya, Alexander Agung, Cleopatra, Antiokhia IV Epiphanes, Amyntas III, Philip II, dll. Nama Makedonia berasal dari kata sifat Yunani kuno "makedon" (tinggi), yang muncul dalam salah satu puisi penyair Homer. Karena konflik saat ini antara Yunani dan Makedonia, orang Yunani memprotes penggunaan Makedonia sebagai nama negara. Mereka melihatnya sebagai pencurian identitas dan budaya Yunani kuno. Penampilan Makedonia penuh dengan simbol kerajaan Makedonia kuno. Perselisihan bermula dari pecahnya Yugoslavia pada awal tahun 1990-an dan deklarasi kemerdekaan oleh salah satu republik konstituennya sebagai "Republik Macedonia." Yunani pun meledak penuh amarah. Bagi orang-orang Yunani, "Macedonia (atau Makedonia)" bukan hanya nama provinsi penting

di sisi utara, tetapi juga merupakan pusat dari kemegahan zaman dahulu ketika masih menjadi kerajaan besar yang dipimpin oleh Philip II dan Alexander Agung. Menurut mereka, “orang Macedonia” dari Yugoslavia merupakan suku Slav, bukan Yunani. Klaim mereka terhadap nama tersebut merupakan dampak dari klaim atas tanah Yunani dan identitas Yunani. Sekitar satu juta warga Yunani turun ke jalan di Thessaloniki untuk melakukan protes pada tahun 1992 dan sejak saat itu selalu terjadi aksi protes secara berkala. Macedonia (bekas Yugoslavia) membalas dengan mengklaim secara demonstratif sebagai pewaris sungguhan Alexander Agung. Mereka menamai bandara dan jalan raya utama dengan nama sang Kaisar, serta mendirikan patung raksasa Alexander Agung di pusat ibukota, Skopje, yang semakin menyulut kemarahan Yunani.

Nama Makedonia dalam dua dekade terakhir adalah masalah politik paling kontroversial dibahas di Makedonia dan Yunani. Secara historis, nama Makedonia terkait dengan kuno Kerajaan Makedonia dari Pella, sebuah kota dekat Thessaloniki di Yunani. Yang paling terkenal para pemimpin dinasti Makedonia adalah Philip II dan penggantinya Alexander Agung, yang memerintah pada abad keempat SM.

Makedonia secara geografis merupakan wilayah Republik Makedonia saat ini, bagian utara bagian dari Yunani (provinsi Makedonia), dan beberapa bagian dari Bulgaria dan Albania. Sebagai entitas geografis dan etnografi Makedonia berhenti ada setelah Perang Dunia I, dengan Perjanjian Bucharest pada tahun 1913, ketika Makedonia dibagi antara Bulgaria, Yunani dan Serbia. Dengan pembagian wilayah, penduduk pun terbagi pula, yaitu penduduk mengakui dirinya sebagai orang Makedonia. Namun, nama 'Makedonia' menjadi bermasalah ketika Vardar Makedonia, bagian dari Makedonia secara geografis, yang berada di bawah pemerintahan Serbia, menjadi Republik Sosialis Makedonia sebagai salah satu Republik keenam Federasi Yugoslavia pada saat itu. Maka nama

Makedonia menjadi bagian dari ranah politik setelah pembubaran Yugoslavia dan proklamasi Republik Makedonia yang independen pada tahun 1991. Pengakuan dan integrasi Republik Makedonia yang baru lahir dihambat oleh tetangganya Yunani, sebagai alasan nama 'Makedonia'. Yunani meminta Republik Makedonia untuk mengubah namanya. Perselisihan mencapai tingkat mediasi internasional tertinggi, yang membutuhkan banyak upaya untuk mencapai solusi. Pada tahun 1995, kedua negara meresmikan hubungan bilateral dan berjanji untuk memulai negosiasi atas nama ini di bawah naungan PBB.

Untuk bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara baru harus puas dengan nama Republik Macedonia Bekas Yugoslavia, yang disingkat menjadi Fyrom yang cenderung memalukan. Hal tersebut bukanlah akhir dari sengketa.

Penduduk Macedonia menolak untuk berada di jajaran negara berhuruf depan F (dari nama resmi Former Yugoslav Republic of Macedonia). Sebaliknya, Yunani menolak Macedonia untuk berada di jajaran negara berawalan abjad M. Tentu saja, Yunani masih tetap menghalangi Macedonia dari menjadi anggota Uni Eropa.

Dengan demikian, peneliti ingin menuangkan ketertarikan terhadap isu di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul ***“PENYELESAIAN SENGKETA PENAMAAN MACEDONIA ANTARA YUNANI DENGAN MAKEDONIA MELALUI PERJANJIAN PRESPA TERHADAP KEANGGOTAAN UNI EROPA”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengusulkan untuk melakukan investigasi identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya Sengketa Penamaan Macedonia antara Yunani dengan Makedonia?
2. Bagaimana tercapainya Perjanjian Prespa antara Yunani dengan Makedonia?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa antara Yunani dengan Makedonia mempengaruhi proses aksesi Makedonia ke Uni Eropa?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan masalah ini agar ruang lingkup penelitian ini tidak terlalu luas. Jadi, penulis menunjukkan bahwa membatasi masalah dengan berfokus pada masalah lebih efisien dan efektif pada Penyelesaian Sengketa Penamaan Macedonia mulai pada tahun 2018, pada saat Yunani dan Makedonia menandatangani Perjanjian Prespa atas perubahan nama FYROM menjadi Republic of North Macedonia (Republik Makedonia Utara). Dan peneliti mengakhiri penelitian hingga tahun 2022, pada saat Makedonia melanjutkan proses aksesi ke Uni Eropa.

Peneliti akan menjelaskan proses penyelesaian sengketa ini berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh DK PBB serta Uni Eropa agar Makedonia dapat melanjutkan proses aksesi menjadi anggota Uni Eropa.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan batasan masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

”Bagaimana Perjanjian Prespa dapat menyelesaikan Sengketa Penamaan Macedonia dan mempengaruhi proses aksesinya ke Uni Eropa?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sejarah Sengketa Penamaan Macedonia antara Yunani dengan Makedonia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Penamaan Macedonia antara Yunani dengan Makedonia melalui Perjanjian Prespa
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh berakhirnya Sengketa Penamaan Macedonia antara Yunani dengan Makedonia.

2. Kegunaan Penelitian

1. Menyelesaikan salah satu syarat ujian sarjana program Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mencari informasi tentang kasus penyelesaian sengketa nama Macedonia antara Yunani dan Makedonia.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.